

Carut-Marut Politik, Tantangan Pengembangan Teologi Politik Substantivistik

Abd A 'La

The political changes that have been experiencing by the Indonesian since the era of reformation show a face of ambivalence. On one hand, the freedom comes with the exciting expectation from the people of this country. On the other hand, the phenomenon has been showing that the political authorization is going on the process accompanied by ethic and moral degradation. This issue has brought Indonesia in a difficult situation and far from justice, peace, and welfare. However, a religious country has been claim by Indonesian as a character of this nation. This paper discusses political issues in Indonesia focusing on the current Indonesian politic, the root of the country's problem; the religion at the centre of the reformation, and the political value of the religion with the significant of the political theology.

Kata kunci: politik, reformasi, degradasi moral, dan kesejahteraan

Perubahan politik yang dialami bangsa Indonesia sejak era reformasi menampakkan wajah yang ambivalen. Pada satu pihak, kebebasan yang mengiringi kedatangan masa yang penuh "harapan" itu memunculkan suatu kegairahan politik yang begitu besar bagi berbagai kalangan dan elemen bangsa. Partai-partai politik bermunculan dengan asas dan sifatnya yang sangat beragam. Sejalan dengan itu, diskursus politik pun marak berkembang menjadi santapan baru bagi masyarakat luas. Geliat politik itu membersitkan kilasan nuansa demokrasi yang dimuati suatu harapan besar akan terjadinya perbaikan signifikan dalam kehidupan politik, yang pada gilirannya dapat berdampak konkret bagi aspek-aspek kehidupan yang lain.

Namun pada pihak yang lain, setelah lima tahun lebih masa itu hadir di hadapan bangsa, fenomena yang berkembang justru

terkesan kuat menuju ke arah yang lain. Kendati bukan merupakan suatu pembalikan, arah politik yang menguat saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan bangsa. Politik yang melaju –sampai batas tertentu– telah terperangkap dalam sejumlah persoalan yang cukup serius. Menguatnya politik kekuasaan, yang berjalan searah dengan memudanya etika-moral dalam berpolitik merupakan salah satu persoalan yang sedang menghadang dunia politik Indonesia dalam kekinian.

Persoalan-persoalan semacam itu mengantarkan bangsa kepada kondisi yang sulit untuk mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan; membuminya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan yang sejenisnya. Sebuah kenaiifan telah terjadi pada bangsa ini. Reformasi sejauh yang mereka jalani tak lebih dari sekadar menggantung asap demokrasi. Tidak berlebihan jika sejumlah tokoh menyatakan,

reformasi hanya berjalan di tempat.

Ironisnya, religiusitas yang sering diklaim sebagai salah satu karakter bangsa belum menampakkan sumbangan signifikan dalam menyikapi persoalan tersebut. Tempat-tempat ibadah yang selalu penuh setiap ada acara ritual keagamaan tidak sebanding, atau bahkan bertentangan, dengan degradasi moralitas yang sedang menggejala kuat di ruang publik.

Carut Marut Politik

Melihat fenomena yang berkembang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung masih menyentuh lapisan tipis kehidupan. Denyut reformasi lebih menampakkan diri dalam bentuk formalitas yang tidak (belum) menyerap ke dalam relung-relung kehidupan publik yang faktual. Kehidupan politik yang sedang berkembang masih sarat dengan nuansa yang tidak searah, bahkan dalam derajat tertentu bertentangan, dengan nilai-nilai demokrasi, atau lebih tepatnya bersebarangan dengan nilai-nilai moral.

Di sini ada fenomena yang cukup kuat yang mengarah kepada pembiasaan politik untuk dijadikan sebagai sekadar alat untuk memburu dan meraup kekuasaan. Sepak terjang para elit dan politisi kita memper-tontonkan secara telanjang menguatnya gejala ini. Di saat pemilihan umum legislatif akan dilangsungkan 2004 lalu, para calon anggota legislatif mengobrol janji akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan akan mengangkat aspirasi mereka. Namun setelah terpilih, mereka justru sibuk dengan urusan pribadi mereka sendiri, mulai dari berbagai fasilitas yang harus mereka miliki hingga kenaikan gaji yang merepresentasikan kesenjangan teramat lebar dengan penghasilan rakyat pada umumnya.

Kepentingan pribadi, kelompok, dan sejenisnya tampak begitu menonjol dalam sepak terjang mereka. Dalam tataran itu kekuasaan lalu menempati posisi yang cukup penting bagi mereka. Mereka menjadi pemburu kekuasaan yang agresif yang berupaya dengan segala cara untuk meraih kekuasaan atau mempertahankannya, serta meluaskan wilayah kekuasaan mereka. Dengan kekuasaan di tangan, mereka mewujudkan kepentingan mereka yang sangat pragmatis dan sesaat.

Dengan demikian, sebagian politisi kita, baik yang berada di legislatif, maupun eksekutif, lebih merupakan (meminjam penjelasan Syafii Maarif) politisi rabun ayam yang hanya mau melihat yang dekat-dekat, yang langsung menyangkut kepentingan jangka pendek mereka. Mereka tidak risau melihat kondisi bangsa dan masyarakat yang porak poranda sebagaimana pula mereka nyaris tidak peduli dengan krisis berkepanjangan, penegakan hukum yang penuh sandiwara, serta demokrasi yang kebablasan.¹ Bahkan sebagian (jika tidak semuanya) dari mereka ikut terlibat dalam terjadinya carut marut kehidupan itu.

Keadaban dan etika moral tampak begitu pudar dalam dunia politik Indonesia yang sedang berkembang. Bahkan nyaris semua proses demokratisasi telah terpangkas dari makna dan nilainya yang bersifat moral. Pemilihan kepala daerah, misalnya, yang seharusnya sebagai wahana aspirasi masyarakat dijungkirbalikkan menjadi ajang *politicking* yang menggerus hangus etika-moral bangsa dan masyarakat. Siapapun bisa dicalonkan asalkan dapat memberikan "keuntungan" semacam materi bagi partai

¹ Lihat Syafii Maarif. *Mencari Autentitas dalam Kegalaan*. Cetakan 1, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2004), hlm. 132

politik dan elitnya. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh *qualified* yang memiliki integritas moral kepribadian sulit untuk bisa terjaring masuk sebagai calon pemimpin di berbagai tingkatannya tanpa ada kontrak politik pragmatis dengan partai politik yang telah dikuasai sepenuhnya oleh elit partai. Dalam hal ini, partai politik yang telah tercerabut dari akarnya nyaris menjadi satu-satunya penentu yang sulit diganggu-gugat lagi. Populisme partai politik tak lebih dari sekadar retorika belaka. Pola semacam itu tampaknya akan terus berlangsung kendati pemilihan langsung sebagai perwujudan aspirasi murni rakyat diberlakukan mulai tahun 2004 lalu.

Akibat yang sangat terasa dari semua itu adalah munculnya sejumlah penguasa bersama politisi yang dari sudut manapun sulit dipertanggung-jawabkan moral dan kinerjanya. Alih-alih akan mendengarkan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat, mereka justru terlibat korupsi, dan praktik-praktik kotor lain yang sangat merugikan negara, rakyat, dan masyarakat secara keseluruhan.

Disadari atau tidak, pragmatisme politik telah menjadi semacam anutan sebagian (besar?) kaum politisi dan penguasa. Hal ini mengantarkan mereka kepada pengembangan intrik-intrik politik yang menjadikan simbol, atribut, dan proses demokrasi direduksi ke dalam ambisi politik kekuasaan. Sejalan dengan itu, premanisme juga menguat menjadi salah satu rujukan dalam sikap dan tindakan mereka. Peristiwa keributan yang diwarnai bentrokan fisik dalam pembukaan sidang tahunan MPR, 1 November 2001, dan terulang kembali pada sidang paripurna DPR yang mengagendakan voting mengenai kenaikan harga BBM, 16 Maret 2005 lalu merupakan dua bukti kuat menggejalanya pola-pola premanisme di kalangan politisi kita.

Premanisme² di kalangan politisi berjalan seiring dengan kekerasan dan aksi anarkis yang terus menggejala pada sebagian masyarakat. Terbukanya kran kebebasan sejak era reformasi mengantarkan masyarakat kepada euforia politik yang tidak terkendali. Mereka menyikapi berbagai persoalan yang menghadang mereka dengan mengedepankan aksi kekerasan atau pola-pola yang bersekat tipis dengan kekerasan. Amuk massa, unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan dan sejenisnya sering menjadi jalan pintas mereka dalam menyelesaikan masalah atau mengekspresikan kehendak mereka. Ada benarnya jika dikatakan, kekerasan telah menjadi ciri lumrah kehidupan sehari-hari dan merupakan cara efektif komunikasi politik.³ Tampaknya keadaban dan moralitas sulit menemukan ranahnya di negeri ini.

Suka atau tidak suka, realitas semacam itu merupakan wajah politik Indonesia. Suatu wajah yang mencerminkan kuatnya politik dengan orientasi kekuasaan yang bercampur baur dengan kekerasan, serta

² Menurut Rudy Gunawan, perilaku para wakil rakyat mirip preman jalanan, yang sedang bertikai. Mereka berteriak, saling tuding, saling dorong, dan terjadi kekerasan fisik. Dalam wacana premanisme, kerusuhan biasanya memiliki alasan kuat, seperti perebutan wilayah, permusuhan yang kronis, balas dendam dan sebab-sebab lain yang bobotnya esensial dalam hukum dunia preman. Berdasarkan hal itu, penyebab kerusuhan anggota wakil rakyat itu bisa merujuk kepada alasan-alasan itu, seperti perebutan kekuasaan dan sejenisnya. Lihat FX Rudy Gunawan, "Premanisme (politik) Para Anggota DPR" dalam Jurnal Budaya dan Filsafat *Mitra*. (Edisi 09 Desember 01 Februari 02, 2002), hlm. 24-25.

³ Lihat Henk Schulle-Nordholt. "Asal Usul Kekerasan" dalam Jurnal *Wacana*. (Edisi 9, Tahun III 2002), hlm. 59.

nyaris diabsahkan melalui manipulasi simbol-simbol demokrasi, dan juga agama.

Membincang Akar Persoalan

Terjadinya krisis moral di dunia politik itu—sampai batas tertentu—bersangkut paut dengan sejarah dan konsep kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat, terutama orang atau kelompok yang memiliki interest dengan kekuasaan. Dalam perspektif sejarah, kekuasaan yang berkembang pada masa kerajaan dulu adalah anggitan kekuasaan *ala* Jawa yang menyikapi kekuasaan sebagai sesuatu yang adikodrati. Dalam pandangan ini, kekuasaan adalah ridla Tuhan. Karena itu, seseorang atau kelompok yang meraih kekuasaan menganggap diri mereka sebagai orang kedua sesudah Tuhan. Dengan kekuasaan itu, semua kejahatan akan terbasuh, bahkan dibenarkan, halal.⁴ Dalam bahasa lain, mereka beranggapan, kekuasaan merupakan anugerah ilahi yang diberikan kepada orang atau kelompok tertentu. Penguasa dengan kekuasaannya memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikannya sesuai dengan kehendaknya.

Karakteristik paling menonjol dari konsep kekuasaan semacam itu terletak pada adanya kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat kepemilikan. Anderson—sebagaimana dikutip Dhakidae—menyebutkan, kekuasaan dalam konsep Jawa adalah sesuatu barang jadi. Kekuasaan adalah konkret, bukan sekadar postulat teoritis, tetapi suatu kenyataan eksistensial.⁵ Pada gilirannya sebagai sesuatu yang konkret, kekuasaan menjadi sesuatu yang dapat dimiliki. Dengan demikian, para pemburu kuasa saling berebutan untuk memiliki kekuasaan.

Meskipun zaman telah berubah, konsep seperti itu sejatinya masih tertanam kuat

dalam pola pikir sebagian masyarakat, mulai rezim Soekarno hingga Soeharto. Ketika Indonesia memasuki era reformasi, konsep itu tetap berkuat pada elit politik dan penguasa. Hal itu tampak dari sikap dan perilaku mereka yang mereduksi simbol dan proses demokrasi yang sedang berjalan ke arah politik yang menjustifikasi terhadap kepemilikan kekuasaan.

Untuk pengembalian kekuasaan kepada maknanya yang transformatif sesuai dengan nilai-nilai demokrasi menjadi agak kesulitan karena pemahaman masyarakat tentang makna hakiki demokrasi dapat dikatakan agak minim. Hasil survei yang dilakukan The Asia Foundation pada tahun 2003 lalu menemukan bahwa dari 1.056 sampel representatif random di 32 provinsi Indonesia, 53% menyatakan tidak mengetahui karakteristik demokrasi yang sebenarnya. Karena itu, tidak berlebihan jika sebanyak itu pula para pemilih lebih memilih pemimpin yang kuat seperti Soeharto, kendati hak-hak dan kebebasan mereka akan mengalami reduksi.⁶ Kenyataan ini menunjukkan, adanya kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau kelompok tertentu tidak membuat masyarakat secara serta-merta menolaknya. Padahal sejarah dan realitas membuktikan, kondisi semacam itu membuat nilai-nilai moralitas terkorbakan.

⁴ Lihat Pramoedya Ananta Toer. "Atas Nama Pengalaman" dalam *Media Kerjabudaya Online*. (<http://mkb.kerjabudaya.org/>), November 1991.

⁵ Lihat Daniel Dhakidae. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Cetakan I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61.

⁶ Lihat Tim Meisburger (ed.). *Democracy in Indonesia: A Survey of the Indonesian Electorate 2003*. (Jakarta: The Asia Foundation, 2003), hlm. 113, 120.

Agama di tengah Deru Reformasi

Kondisi dan perkembangan politik yang dialami bangsa itu menyembulkan suatu ironi yang menggugat nurani kita. Degradasi moral dalam dunia politik justru terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sarat dengan simbol dan ritual keagamaan. Masjid selalu penuh sesak, dan demikian pula tempat-tempat ibadah yang lain. Upacara keagamaan dari saat ke saat diadakan di mana-mana. Namun pada saat yang sama, kekerasan politik, praktik-praktik politik yang jahat dan kotor juga menggejala kuat.

Konkretnya, di satu pihak ada antusiasme religius yang menggelegak di mana-mana, tapi di pihak lain moralitas ternyata justru kian parah terpuruk tanpa daya. Dekandensi dan degradasi moral demikian meluas dan parah di segala lapisan⁷ termasuk di kalangan orang dianggap sangat religius. Hal ini menunjukkan, keberagamaan dominan yang berkembang saat ini adalah suatu keberagamaan yang tidak atau kurang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan moral. Bahkan tidak menutup kemungkinan, keberagamaan yang ada saat ini juga ikut terlibat dalam terjadinya peminggiran moral dari ranah politik.

Munculnya keberagamaan yang acuh tak acuh dalam menyikapi krisis etika-moral politik ini terkait erat dengan kepegangan masyarakat kita (sama seperti mayoritas umat manusia yang lain) atas agama yang umumnya bersifat *ascribed*, dan bukan bersifat *achieved*.⁸ Mereka beragama sekadar mewarisi dari orang tua, lingkungan mereka, dan semacamnya; dan bukan berangkat dari hasil jerih payah mereka untuk mencari kebenaran. Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi persoalan selama ada upaya *intents* untuk memperkaya wawasan

terhadap agama yang mereka anut dan berusaha terus menangkap inti ajarannya. Namun kenyataannya, banyak di antara mereka, terutama yang di akar rumput, menerimanya secara *taken for granted*. Dalam kondisi seperti itu, sebagian dari mereka beranggapan bahwa dengan sekadar menganut agama tertentu, mereka nantinya akan memperoleh keselamatan eskatologis. Dan sebagian yang lain menjadikan "beragama" lebih karena tradisi semata. Alhasil, mereka beragama bukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, terutama dalam pengkayaan spiritualitas dan penguatan etika-moral.

Dalam konteks umat Islam Indonesia (senyatanya pula di negara-negara Muslim yang lain), persoalan itu masih diperparah lagi dengan menguatnya Islam politik. Kelompok ini yang oleh Fadl disebut gerakan puritanisme menjadikan kepentingan politik sebagai diskursus publik dominan yang menjadikan pemikiran dan pengembangan moral sampai derajat tertentu terpinggirkan.⁹ Dalam keberagamaan kelompok ini, orientasi kekuasaan begitu kuatnya. Mereka berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan. Sebab dalam anggapan mereka, kekuasaan

⁷ Lihat I. Bambang Sugiharto. "Berhala Baru Agama-Agama" dalam Martin L. Sinaga (ed.). *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*. Cetakan I, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 57.

⁸ Lihat Gerson Tom Therik. "Arus Balik Globalisasi dalam Milenium Ketiga" dalam Martin L. Sinaga (ed.). *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*. Cetakan I, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 51.

⁹ Lihat Khaled Abou El Fadl. "The Ugly Modern and the Modern Ugly: Reclaiming the Beautiful in Islam" dalam Omid Safi (ed.). *Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism*.

akan menyelesaikan persoalan bangsa, dan umat Islam secara khusus.

Persoalan moral menjadi terpinggirkan dalam kelompok ini, karena konsep politik mereka merujuk kepada *theology of power*. Teologi ini memiliki karakteristik yang sangat menekankan pada sikap arogansi kebenaran yang distingtif *vis-a-vis* orang atau kelompok lain yang tidak masuk dalam kelompok mereka, baik Barat dan non-Muslim, maupun juga Muslim yang berbeda aliran, dan wanita Muslim. Pada saat yang sama, perhatian utama dan nyaris satu-satunya adalah kekuasaan dan simbolnya, dan menjadikan nilai-nilai yang lain harus tunduk di bawah kekuasaan.¹⁰ Klaim kebenaran sepihak yang dianut kelompok Islam politik yang puritan ini membuat mereka mengedepankan nilai-nilai sendiri yang berbeda, dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral perennial serta ajaran substantif agama. Dengan sikap arogansi yang ada pada mereka, mereka menyebarkan dan memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada pihak lain. Pada sisi ini, etika-moral mengalami pemasungan sehingga lumpuh dan mandul dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada gilirannya, penyalahgunaan kekuasaan dan sejenisnya menjadi kejadian yang sulit untuk dielakkan.

Kecenderungan yang mengedepan saat ini menunjukkan, kelompok puritanisme itu –bersama dengan pemburu kekuasaan yang lain –ikut terlibat kontestasi secara *intens* dan mati-matian dalam perebutan kekuasaan. Mereka berusaha memasuki segala peluang yang ada dengan cara mereka sendiri yang terkadang, atau sering, berada dalam satu konser yang sama dengan para petualang politik yang lain. Artinya, mereka bisa menggunakan cara-cara yang sama tidak bermoralnya dengan yang dikembangkan

oleh elit politik dan penguasa yang serakah. Kekerasan, sikap mendiskreditkan orang atau kelompok lain, atau tindakan kotor yang lain menjadi bagian dari upaya mereka dalam pencapaian atau peneguhan kekuasaan.

Sejalan dengan itu, kelompok menengah dalam bentuk *civil society* kurang berkembang dengan kokoh di bumi Indonesia. Padahal, masyarakat sipil sebagai masyarakat moral yang tidak dikebiri dengan kepentingan sektarian, pragmatis, dan sesaat mutlak diperlukan keberadaannya dalam negara untuk mengontrol dan mengkritisi kekuasaan agar tidak diselewengkan ke arah yang dapat merugikan rakyat. Akibat rapuhnya masyarakat semacam itu di negara ini, penyelewengan kekuasaan tambah menjadi-jadi tanpa mendapat rintangan yang cukup berarti dari masyarakat.

Nilai-Nilai Politik dalam Agama, dan Signifikansi Teologi Politik

Sejatinya agama dalam tulisan ini bahasan akan ditekankan kepada Islam memiliki nilai-nilai dan ajaran yang dapat mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan politik dan juga lainnya yang etis dan tercerahkan. Melalui agama, manusia dapat memaknai kehidupan dan mendalami tujuan hidup yang sebenarnya sehingga kehidupan memiliki arti senyatanya bagi manusia dan seluruh isi alam.

Penelusuran secara serius akan mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam senyatanya bersifat moral yang diletakkan dalam kerangka ajaran

¹⁰ Lihat Khaled Abou El Fadl. "Islam and the Theology of Power" dalam *Middle East Report Report*, (221, 2001).

monoteisme. Menurut Fazlur Rahman, inti ajaran tauhid ini –sebagaimana diajarkan Muhammad (saw) sejak awal –terkait erat dengan humanisme dan rasa keadilan sosial, ekonomi (dan tentu saja politik) yang intensitasnya tidak kurang dari intensitas tentang ide tauhid itu sendiri. Kedua ajaran ini merupakan ekspresi dari satu entitas, sebagai *èlan* yang menghasilkan masyarakat Muslim Madinah sebagai reformasi sosial (dan politik) dengan watak solidaritas dan egalitarianisme yang sangat kokoh.¹¹ Dua ajaran itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu Islam. Sebagai satu entitas, kedua aspek itu tidak mungkin dipisahkan dalam kondisi apa pun dan waktu kapan pun.

Berdasarkan pada prinsip itu, Islam sangat menekankan pada *al-ihsan* dan *al-amal al-shaleh* sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an. *Al-ihsan* yang pada dasarnya bermakna segala perbuatan baik yang dapat mengaktualisasikan kejadiannya manusia, dan *al-amal al-shaleh* dalam bentuk segala aksi yang dapat memberikan manfaat kepada umat manusia mencerminkan seutuhnya tentang prinsip *al-maslahah al-amm* (kepentingan umum) sebagai etika-moral dan hukum Al-Qur'an.¹² Kepentingan umum merupakan etika-moral yang harus menjadi rujukan dalam segala kehidupan umat, dan khususnya kehidupan politik sebagai salah satu aspek utama kehidupan manusia di ranah publik.

Kemaslahatan umum itu pada gilirannya meniscayakan untuk meletakkan *syûrâ* (musyawarah) sebagai bagian inheren dalam keseluruhan proses politik dan kekuasaan yang akan dikembangkan. Sebab, bagaimanapun juga, kepentingan umum tidak akan pernah membumi dalam realitas konkret tanpa adanya penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam jaringan kekuasaan dan menjadikan hal itu sebagai

rujukan dalam pengembangan agenda dan kebijakan politik. Partisipasi masyarakat dalam wilayah publik itu adalah kekuasaan itu sendiri yang harus disandingkan dengan nilai-nilai moralitas yang lain, seperti kesetaraan, keadilan, dan solidaritas sosial.

Pada sisi itu terjadinya titik temu antara Islam dan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, etika-moral dalam bentuk menghormati kehendak mayoritas dan hak-hak orang lain, keadilan, simpati, dan kepercayaan merupakan prinsip demokrasi yang paling penting. Prinsip *apriori* demokrasi yang bersifat moral ini menjadikan demokrasi tidak akan berhasil tanpa komitmen terhadap ketentuan moral. Dengan demikian, demokrasi berutang besar terhadap agama yang dilihat dari sudut manapun merupakan benteng moralitas.¹³ Artinya, ketika moralitas yang demikian menjadi pijakan kokoh dalam kehidupan, maka penyalahgunaan kekuasaan dan bahaya kekuasaan tidak akan atau sulit terjadi. Minimal, masyarakat akan segera merespons dan mengkritisi setiap ada upaya yang akan menyimpangkan kekuasaan dari makna dan tujuannya yang esensial.

Untuk pengembangan keberagamaan transformatif yang dapat mengembalikannya politik ke perannya yang *genuine*, rekonstruksi teologi politik menjadi urgen

¹¹ Lihat Fazlur Rahman. *Islam*. Edisi Kedua. (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 12 -13.

¹² Lihat Muhammad Abid al-Jabiri. *Al-'Aql al-Akhlaq al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nadhmi al-Qiyam fi al-Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Cetakan I, (Marokko: Dar al-Nasyr al-Maghribi, 2001), hlm. 630.

¹³ Abdul Karim Soroush. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Terjemahan, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 222.

untuk diagendakan. Senyatanya teologi politik ini sama sekali bukan hal yang baru. Sebelumnya Asghar Ali Engineer dengan Teologi Pembebasan-nya telah mengingatkan kita tentang peran agama dalam melawan kekuasaan yang menindas.¹⁴ Farid Esack juga menawarkan tafsir pluralistik yang mencoba melakukan redefinisi tentang konsep *iman* dan *kufir* dengan hasil yang cukup signifikan dalam bentuk kemampuan umat Islam dan umat agama yang lain secara bersama-sama melawan penindasan kaum Apartheid di Afrika Selatan¹⁵.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjadikan teologi semacam itu bisa kompatibel dengan persoalan Indonesia, mampu mendorong umatnya kepada aksi konkret, serta tidak apologis, apalagi sekadar sebagai justifikasi sehingga dapat dijadikan pijakan moralitas bersama dalam mengembangkan politik Indonesia yang lebih humanis dan bermoral. Teologi politik yang perlu dikembangkan adalah teologi substantivistik yang ke dalam mampu memberikan keimanan kokoh, dan ke luar dapat mendorong para penganutnya mengimplementasikan makna moral yang dikandungnya. Pada saat yang sama, melalui iman yang bersifat aksi ini, mereka terdorong untuk melihat realitas persoalan yang dihadapi Indonesia, sekaligus memberikan tawaran-tawaran yang transformatif.

Untuk pencapaian hal itu, umat Islam Indonesia dituntut mengembangkan interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara padu. Teks-teks yang mengangkat suatu persoalan perlu diletakkan dalam satu bingkai pemahaman yang utuh dan kokoh, dan tidak dipahami secara terpisah satu dengan lainnya. Dalam perspektif itu pula, sumber Islam ini perlu ditafsirkan secara terbuka melalui pendekatan moral dan

historis. Hal ini perlu dilakukan karena Al-Qur'an (dan juga Sunnah Rasul) merupakan *prophetic discourse* yang terbuka dengan fungsi artikulasi linguistiknya yang konstitutif dan utama adalah untuk mengekspresikan arti eksistensi manusia hakiki yang sejatinya terkait dengan tiga nilai; yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan¹⁶ yang bersifat moralitas luhur dan perennial. Pencapaian terhadap hal ini meniscayakan umat Islam Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap sumber itu secara holistik pula. Mereka dituntut untuk menggali khazanah keilmuan Islam klasik, historitas seputar *asbabun nuzul* ayat Al-Qur'an dan *asbab al-wurud* Sunnah Rasul, serta hal-hak yang berkaitan dengan itu. Seiring dengan itu, khazanah intelektualitas modern, terutama aspek epistemologinya menjadi sesuatu

¹⁴ Lihat Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terjemahan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 31 ff.

¹⁵ Lihat Farid Esack. *Qur'an, Liberation and Pluralism*. (Oxford: Oneworld, 1997), hlm. 114 ff.

¹⁶ Lihat Muhammad Arkoun. *The Unthought in Contemporary Islamic Discourse*. (London: Saqi Books, 2002), hlm. 45, 53-54, dan 60. Sebenarnya banyak tokoh Muslim yang menggagas pembacaan al-Quran secara holistik dan terpadu. Mereka nyaris sepakat, pembacaan model ini akan mengantarkan al-Quran sebagai sumber moral, dan karenanya dilihat dari sudut manapun Islam adalah agama etika-moral. Bagi mereka, hal itu merupakan kenyataan yang tidak dapat ditawar-tawar kembali. Untuk bacaan lebih lanjut, silahkan baca Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982); Khaled Abou El Fadl, "Toleransi dalam Islam" dalam Joshua Cohen dan Ian Lague (eds.). *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Terjemahan, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Arsy, 2003).

yang cukup signifikan untuk ditoleh. Untuk menghasilkan produk pemaknaan yang lebih implementatif, sejarah dan kondisi sosial-politik Indonesia perlu juga dimasukkkan. Dengan demikian, mereka akan memiliki wawasan dan pemikiran luas yang mengantarkan mereka kepada kemampuan untuk mengaitkan makna universal nilai dan ajaran Islam ke dalam kehidupan konkret yang dialami bangsa.

Terkait dengan itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan politik, atau seputar kehidupan manusia di ranah sosial perlu dibaca, diinterpretasikan, dan dipahami dalam pola dan bingkai seperti itu. Melalui pembacaan semacam itu, Al-Qur'an sepenuhnya akan menyatakan tentang keharusan pembumian nilai-nilai moral keadilan, kesetaraan, solidaritas sosial, dan musyawarah dalam ranah publik. Berdasarkan nilai-nilai itu, umat Islam kemudian mengembangkan teologi politik yang perlu diletakkan dan disikapi sebagai dasar keberagamaan mereka. Sebagai dasar keberagamaan, mereka niscaya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan mereka, serta melabuhkannya dalam dunia sosial-politik. Pada sisi itu pula, umat Islam yang tidak mengamalkan nilai-nilai dasar itu perlu disikapi bukan hanya sebagai orang yang tidak menjalankan ajaran agama, tapi juga sebagai orang yang tidak mempercayai agama itu sendiri.

Pengembangan teologi politik tidak bisa berhenti sebatas itu. Ketika umat Islam mengusung nilai-nilai itu ke ruang publik, mereka sebagai bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki kewajiban moral-teologis untuk menjadikan nilai-nilai itu melalui dialog dan sejenisnya sebagai milik bersama yang melampaui komunitas tertentu dan dapat diyakini kebenarannya bukan hanya oleh umat Islam, tapi bangsa secara keseluruhan.

Keberpegangan umat Islam, dan bangsa terhadap nilai-nilai substansial itu diharapkan akan memunculkan masyarakat sipil yang kokoh di negara ini, selain juga berkembangnya *good dan clean government*. Umat Islam bersama komunitas yang lain sebagai masyarakat bermoral yang kritis dari saat ke saat dan berkesinambungan akan selalu menyikapi segala kebijakan politik dengan kritis dan penuh keadaban dan selalu memiliki kepekaan terhadap degradasi moral yang ada di sekitarnya. Sebagaimana dinyatakan Soroush, masyarakat yang sensitif terhadap kerusakan moral dan kejujuran akan lebih siap untuk menjadi saksi dan hakim para penguasa dan menjadi kritisi yang lebih waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷ Sebab sistem yang hanya diletakkan kepada sekadar hukum formal tidak akan mampu sepenuhnya mengawasi kehidupan dengan segala seluk beluknya. Sistem legal semata hanya dapat berfungsi pada tataran perilaku dan interaksi yang bersifat lahiriyah yang sulit menembus relung-relung keserakahan dan ambisi yang ada pada diri kita.

Konkretnya, teologi politik selain dikembangkan sebagai dasar keberagamaan yang bersifat personal, juga direkonstruksi sebagai pijakan dalam kehidupan publik yang selalu menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan memberikan peluang besar bagi tumbuh dan mengakarnya suatu pemerintahan yang bersih dan baik, serta hadirnya masyarakat sipil yang tangguh. Dengan hadirnya teologi politik seperti itu, kendati, misalnya, nanti masih muncul penguasa

¹⁷ Abdul Karim Soroush. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Mizan, Bandung, 2002. hlm. 222.

dengan karakter yang lama, maka masyarakat akan selalu siap mengkritisi segala kebijakannya. Pemburnian teologi politik substantivistik memberikan harapan besar atas hadirnya politik yang relatif bersih dari penyalahgunaan kekuasaan dan sejenisnya. Politik yang akan berkembang adalah politik bermoral dan kekuasaan yang berorientasi kepada kepentingan seluruh rakyat

Persoalannya, siapakah yang harus memulai agenda tersebut? Tentunya, para ulama bersama tokoh-tokoh intelektual yang lain yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat luas. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan keberagamaan umat sebagai keberagamaan yang transformatif yang peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Karena itu, daripada mereka ramai-ramai ikut rebutan kekuasaan, mereka sebaiknya mengembangkan dasar-dasar dan nilai agama substantif, terutama dalam kaitannya dengan politik, yang bersifat implementatif dan bermoral sehingga bermanfaat signifikan bagi kehidupan dan masa depan bangsa. ●

Daftar Pustaka

Abdul Karim Soroush, 2002, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Terjemahan, Cetakan I, Bandung: Penerbit Mizan.

Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terjemahan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daniel Dhakidae, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Cetakan I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Farid Esack, 1997, *Qur'an, Liberation and Pluralism*, Oxford: Oneworld.

Fazlur Rahman, 1979, *Islam*. Edisi Kedua. Chicago dan London: The University of Chicago Press.

Fazlur Rahman, 1982, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.

FX Rudy Gunawan, "Premanisme (politik) Para Anggota DPR" dalam Jurnal Budaya dan Filsafat *Mitra*. (Edisi 09 Desember 01 Februari 02, 2002).

Gerson Tom Therik, 2000, "Arus Balik Globalisasi dalam Milenium Ketiga" dalam Martin L. Sinaga (ed.). *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*. Cetakan I, Jakarta: Grasindo.

Henk Schulle-Nordholt. "Asal Usul Kekerasan" dalam Jurnal *Wacana*. (Edisi 9, Tahun III 2002).

I. Bambang Sugiharto, 2000, "Berhala Baru Agama-Agama" dalam Martin L. Sinaga (ed.). *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*. Cetakan I, Jakarta: Grasindo.

Khaled Abou El Fadl, 2003, "Toleransi dalam Islam" dalam Joshua Cohen dan Ian Lague (eds.). *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Terjemahan, Cetakan I, Bandung: Penerbit Arsy.

Khaled Abou El Fadl. "The Ugly Modern and the Modern Ugly: Reclaiming the Beautiful in Islam" dalam Omid Safi (ed.). *Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism*".

Topik: Manajemen Negara dan Nasionalisme

- Khaled Abou El Fadl. "Islam and the Theology of Power" dalam *Middle East Report Report*, (221, 2001).
- Muhammad Abid al-Jabiri, 2001, *Al-'Aql al-Akhlaq al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nadhmi al-Qiyam fi al-Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Cetakan I, Marokko: Dar al-Nasyr al-Maghribi.
- Muhammad Arkoun, 2002, *The Unthought in Contemporary Islamic Discourse*. London: Saqi Books
- Pramoedya Ananta Toer. "Atas Nama Pengalaman" dalam *Media Kerjabudaya Online*. (<http://mkb.kerjabudaya.org/>), November 1991.
- Syafii Maarif, 2004, *Mencari Autentitas dalam Kegalauan*. Cetakan I, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah.
- Tim Meisburger (ed.), 2003, *Democracy in Indonesia: A Survey of the Indonesian Electorate 2003*. Jakarta: The Asia Foundation.

